

Strategi Digitalisasi Transaksi Keuangan dalam Pengawasan dan Monitoring Kemitraan Universitas dan Bank Negara

Naila Mutia Hafidzah¹, Intan Dwi Noviana², Eva Hany Fanida³, Melda Fadiyah Hidayat⁴

¹²³⁴S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: 25040674137@mhs.unesa.ac.id, 25040674185@mhs.unesa.ac.id, evafanida@unesa.ac.id, meldahidayat@unesa.ac.id.

Article History:

Received: 12 Mei 2026

Revised: 27 Mei 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords: Digitalisasi
Keuangan, Transaksi
Keuangan, Monitoring
Keuangan, Collaborative
Governance, SDGs 17

Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan sistem pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam institusi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi digitalisasi transaksi keuangan dalam mendukung pengawasan dan monitoring keuangan pada kemitraan antara Universitas dan bank milik negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi, seperti laporan tahunan perbankan, laporan kebijakan sistem pembayaran, serta dokumen institusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta mendukung monitoring keuangan secara real-time. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta mendukung praktik collaborative governance melalui kemitraan lintas sektor. Namun demikian, implementasi digitalisasi masih menghadapi tantangan berupa kesiapan sumber daya manusia dan risiko keamanan siber. Oleh karena itu, digitalisasi transaksi keuangan menjadi strategi penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang modern dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mendorong perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan dan keuangan. Digitalisasi transaksi keuangan merupakan salah satu inovasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan institusi. Dalam konteks kemitraan antara Universitas dan bank milik negara, penerapan sistem digitalisasi transaksi keuangan menjadi strategi yang krusial dalam mendukung proses pengawasan dan monitoring keuangan secara *real time* dan terintegrasi.

Permasalahan utama yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan konvensional adalah rendahnya transparansi, keterlambatan pelaporan, serta potensi terjadinya kesalahan pencacatan bahkan penyalahgunaan dana. Sistem manual yang masih digunakan di beberapa institusi menyebabkan proses monitoring menjadi tidak efektif dan rentan terjadi *human error*. Oleh karena itu digitalisasi keuangan hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui

sistem yang terotomatisasi dan berbasis teknologi informasi.

Selain itu, terdapat berbagai isu yang berkaitan dengan implementasi digitalisasi keuangan, seperti kesiapan sumber daya manusia, keamanan data, serta integrasi sistem antar lembaga. Menurut Vial (2019), transformasi digital tidak hanya melibatkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan organisasi dan budaya kerja yang memerlukan adaptasi yang tidak sederhana. Di sisi lain, meningkatnya penggunaan sistem digital juga diiringi dengan risiko keamanan *cyber*, yang semakin kompleks (Susanto et al., 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Penelitian oleh Mulyani dan Sari (2020) menemukan bahwa penggunaan sistem keuangan digital di institusi pendidikan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama (2021) yang mengatakan bahwa digitalisasi sistem pembayaran berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan administratif. Sementara itu, penelitian oleh Nugroho (2022) menekankan pentingnya integrasi sistem antara lembaga pendidikan dan perbankan untuk mendukung monitoring keuangan yang lebih efektif.

Lebih lanjut, konsep *good governance* menjadi landasan penting dalam implementasi digitalisasi keuangan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem digital dalam pengelolaan keuangan publik (OECD, 2014). Digitalisasi memungkinkan adanya akses data secara terbuka dan *real-time* sehingga mempermudah proses pengawasan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, strategi digitalisasi transaksi keuangan dalam kemitraan ini juga relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-17 yaitu *Partnerships for the Goals*. SDGs No. 17 menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor perbankan, dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kemitraan antara Universitas dan bank milik negara mencerminkan bentuk kolaborasi lintas sektor yang mendukung penguatan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya integrasi sistem keuangan digital, kemitraan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan, tetapi juga memperkuat sinergi antar lembaga dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam bagaimana strategi digitalisasi transaksi keuangan diterapkan dalam pengawasan dan monitoring kemitraan antara Universitas dan bank milik negara, serta bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang baik sekaligus mendukung pencapaian SDGs No. 17 melalui penguatan kemitraan yang strategis dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-komparatif yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus membandingkan strategi digitalisasi transaksi keuangan dalam pengawasan dan monitoring pada kemitraan antara institusi pendidikan dan sektor perbankan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji, sedangkan pendekatan deskriptif-komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta pola yang muncul dari berbagai sumber data yang telah tersedia (Creswell, 2014). Penelitian ini tidak menggunakan data primer, melainkan sepenuhnya memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas digitalisasi

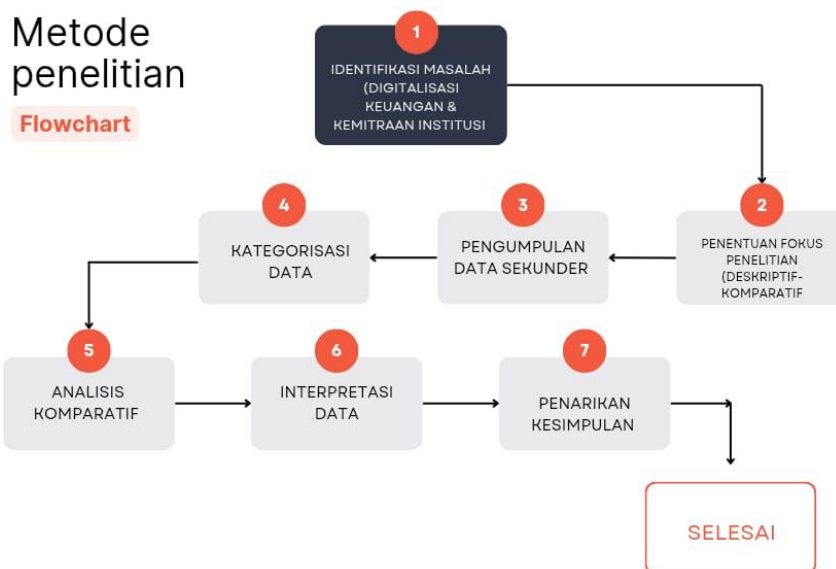
transaksi keuangan, tata kelola keuangan, dan sistem monitoring keuangan, buku referensi terkait transformasi digital dan governance serta berbagai dokumen resmi institusi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk memperoleh landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji dokumen resmi yang berkaitan dengan implementasi digitalisasi transaksi keuangan dan kemitraan kelembagaan. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif tanpa harus melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dikombinasikan dengan pendekatan komparatif. Proses analisis dimulai dari reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam beberapa tema utama seperti strategi digitalisasi, mekanisme pengawasan dan monitoring, serta pola kemitraan antar lembaga. Tahap berikutnya adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan berbagai temuan dari sumber yang berbeda untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kecenderungan yang muncul. Tahap akhir adalah interpretasi data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan bermakna (Krippendorff, 2018).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur dan dokumen yang berbeda, serta memastikan penggunaan sumber yang kredibel, relevan, dan mutakhir. Selain itu, konsistensi antara data, kategori, dan hasil interpretasi juga diperhatikan untuk menjaga validitas hasil penelitian.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan kerangka good governance dan collaborative governance sebagai dasar untuk memahami praktik digitalisasi dalam konteks kemitraan antar lembaga. Hal ini diperkuat dengan keterkaitan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-17 (*Partnerships for the Goals*), yang menekankan pentingnya kolaborasi strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan berbasis digital. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif sekaligus analisis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data sekunder yang meliputi laporan institusi pendidikan, laporan tahunan bank milik negara, dokumen kebijakan sistem pembayaran, serta literatur ilmiah yang relevan, ditemukan bahwa digitalisasi transaksi keuangan telah menjadi salah satu strategi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan sistem tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Implementasi digitalisasi ditandai dengan penggunaan berbagai instrumen keuangan digital seperti *virtual account*, *mobile banking*, serta sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi dengan sistem internal institusi.

Laporan keberlanjutan perbankan menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui pengurangan biaya transaksi, percepatan proses layanan, serta peningkatan volume transaksi digital secara signifikan (Bank Mandiri, 2024). Selain itu, kebijakan sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia juga menegaskan bahwa digitalisasi berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang efisien, aman, dan inklusif (Bank Indonesia, 2021). Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memberikan dampak pada level institusi, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan perkembangan sistem keuangan secara nasional.

Dalam konteks institusi pendidikan khususnya di Universitas, integrasi sistem keuangan dengan layanan perbankan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Sistem digital memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Selain itu, akses terhadap data keuangan menjadi lebih terbuka dan dapat dilakukan secara real-time, sehingga mempermudah proses monitoring dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi keuangan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana (Mulyani & Sari, 2020), serta meningkatkan efisiensi operasional organisasi (Pratama, 2021).

Untuk memperjelas perbedaan antara sistem manual dan digital, berikut disajikan tabel komparatif:

Tabel. 1 Komparatif Sistem Manual vs Sistem Digital

Aspek	Sistem Manual	Sistem Digital
Proses	Manual	Otomatis
Kecepatan	Lambat	Real time
Akurasi	Rentan eror	Tinggi
Transparansi	Rendah	Tinggi
Monitoring	Periodik	Real time
Efisiensi	Rendah	Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sistem digital memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan sistem manual dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan. Sistem digital memungkinkan proses pencatatan dan pelaporan dilakukan secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja administratif. Selain itu, kemampuan sistem digital dalam menyediakan data secara real-time memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, di mana informasi keuangan dapat diakses secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (OECD, 2014).

Untuk memperkuat analisis berbasis data, berikut disajikan indikator kinerja sebelum dan sesudah digitalisasi:

Tabel. 2 Indikator Kinerja Digitalisasi Keuangan

Indikator	Sebelum Digitalisasi	Sesudah Digitalisasi	Sumber Data
Waktu transaksi	1-2 hari	Real time	Laporan bank
Tingkat kesalahan	Tinggi	Rendah	Literatur
Akses data	Terbatas	Terbuka	Dokumen sistem
Biaya operasional	Tinggi	Lebih efisien	<i>Annual report</i>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Percepatan waktu transaksi dan penurunan tingkat kesalahan menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan efektivitas operasional secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan laporan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem pembayaran mampu meningkatkan efisiensi serta memperluas akses layanan keuangan (Bank Indonesia, 2021).

Dalam konteks kemitraan, digitalisasi transaksi keuangan mencerminkan praktik collaborative governance, di mana berbagai aktor bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran yang jelas (Ansell & Gash, 2008). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3 Analisis Kemitraan

Aktor	Peran	Kontribusi	Bentuk kolaborasi
Universitas	Pengelola keuangan	Data & sistem internal	Integrasi sistem
Bank	Penyedia layanan	Infrastruktur digital	Virtual account
Regulator	Pengawas	kebijakan	Sistem pembayaran

Kemitraan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sinergi antar lembaga. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-17 (*Partnerships for the Goals*), yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2022).

Namun demikian, implementasi digitalisasi transaksi keuangan juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut disajikan analisis kelebihan dan kendala:

Tabel. 4 Kelebihan dan Tantangan Digitalisasi

Aspek	Kelebihan	Tantangan
Teknologi	Cepat & efisien	Infrastruktur
SDM	Kemudahan penggunaan	Literasi digital
Keamanan	Sistem lebih aman	Risiko cyber

Tabel tersebut menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memiliki berbagai keunggulan, terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan keamanan sistem. Transformasi digital memerlukan kemampuan adaptasi organisasi yang tinggi, termasuk peningkatan literasi digital serta penguatan sistem keamanan untuk mengantisipasi risiko

siber (Vial, 2019; Susanto et al., 2021).

Secara lebih mendalam, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga pada perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan. Sistem digital mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, dan berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan bagian dari transformasi kelembagaan yang lebih luas, yang tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan dalam kemitraan antara institusi pendidikan khususnya Universitas dan sektor perbankan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi, digitalisasi juga memperkuat kemitraan antar lembaga serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs tujuan ke-17.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi transaksi keuangan dalam kemitraan antara institusi pendidikan dan sektor perbankan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Implementasi sistem digital terbukti mampu mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi data, serta mendukung monitoring keuangan secara real-time. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat konsep good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, di mana sistem digital memungkinkan akses informasi keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penelitian ini juga menguatkan pendekatan collaborative governance, yang menekankan pentingnya kerja sama antar aktor dalam mencapai tujuan bersama. Kemitraan antara institusi pendidikan dan sektor perbankan menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya sinergi antar lembaga.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengaitkan digitalisasi transaksi keuangan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-17 (*Partnerships for the Goals*). Digitalisasi dalam konteks kemitraan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Dengan demikian, digitalisasi dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang mendukung terciptanya tata kelola yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, serta risiko keamanan siber. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, baik kepada pihak yang diteliti maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya:

1. Saran bagi institusi (Universitas dan Mitra Perbankan)

Institusi pendidikan diharapkan dapat terus mengembangkan dan mengoptimalkan sistem digitalisasi transaksi keuangan dengan memperkuat infrastruktur teknologi dan meningkatkan integrasi sistem dengan pihak perbankan. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi digital

agar implementasi sistem dapat berjalan secara optimal. Pihak perbankan juga diharapkan dapat terus berinovasi dalam menyediakan layanan keuangan digital yang lebih adaptif, aman, dan mudah diakses oleh pengguna.

2. Saran bagi Pemerintah dan Regulator

Pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait sistem pembayaran digital, khususnya dalam aspek keamanan dan perlindungan data. Selain itu, diperlukan dukungan kebijakan yang mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka SDGs.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan data sekunder dan data primer, seperti wawancara atau survei, sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi digitalisasi transaksi keuangan. Selain itu, penelitian juga dapat memperluas objek kajian pada institusi pendidikan lain atau membandingkan berbagai model kemitraan yang berbeda untuk memperoleh hasil yang lebih generalizable. Penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) juga dapat menjadi alternatif untuk mengukur secara lebih spesifik dampak digitalisasi terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Mandiri. (2024). *Sustainability report*. Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyani, S., & Sari, D. (2020). Digital financial system and transparency in educational institutions. *Jurnal Keuangan Publik*, 12(2), 45–56.
- Nugroho, A. (2022). Digital transformation in banking sector: Challenges and opportunities. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 67–78.
- OECD. (2014). *Principles of public governance*. Paris: OECD Publishing.
- Pratama, R. (2021). The impact of digital payment systems on organizational efficiency. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 10(3), 112–125.
- Susanto, H., Rahmawati, L., & Putra, A. (2021). Cybersecurity challenges in digital financial services. *Journal of Information Systems Security*, 8(1), 23–35.
- United Nations. (2022). *The sustainable development goals report*. New York: United Nations.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- Yusuf, M., & Kurniawan, T. (2021). Implementation of digital governance in public sector financial management. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 89–102.
- Widiana, A., Sitepu, F. E. B., Natasya, N., Nur'ain, S. J., & Sakuntala, D. (2024). Dampak digitalisasi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan global. *General Ledger: Jurnal Studi Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 3(2).